

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Oktavianto, M. R. A. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Kejahatan Yang Melibatkan Hewan Dalam Hukum di Indonesia. *Justitia*, 9(2), 728–735.
- Alsted, N., Manteca, X., Stelvig, M., & Forkman, B. (2021). *A critical review of animal-based welfare indicators for polar bears ( Ursus maritimus ) in zoos : Identification and evidence of validity.* 1–18. <https://doi.org/10.7120/09627286.30.1.001>
- Asia for Animals Coalition. (n.d.). Retrieved July 31, 2022, from <https://www.asiaforanimals.com/news>
- Boy, T., & Hutabarat, R. R. (2021). *Three Boy & Rugun Romaida Hutabarat Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor : 320/PID.SUS/2020/PT.DKI).* 4, 3768–3788.
- Efritadewi, A. (2021). *Modul Hukum Pidana.* Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Franks, B. (2019). What do animals want? *Animal Welfare*, 28(1), 1–10. <https://doi.org/10.7120/09627286.28.1.001>
- Gulo, N. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 216–217. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Hidayat, R., & Syamsah, T. N. (2015). Analisis Penerapan dan Penguatan Hukum Animal Welfare pada Bisnis Sapi di Indonesia. *Living Law*, 7(2), 140–149.
- Ilham, M. (2022). *Kesadaran Runtuh Teknologi Bergemuruh* (N. Qosim, Ed.). Semarang: CV. Alinea Media Dipantara.
- Iqbal, M. (2019). *Hukum Pidana* (1st ed.; T. Kurrohman, Ed.). Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Cahaya Keadilan*, 3(1), 34–35.
- Kamus Hukum Online. (n.d.-a). Retrieved June 22, 2022, from <https://kamushukum.web.id/?s=tinjauan>
- Kamus Hukum Online. (n.d.-b). Retrieved June 22, 2022, from <https://kamushukum.web.id/search/yuridis>
- KBBI Daring. (n.d.-a). Retrieved June 22, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>
- KBBI Daring. (n.d.-b). Retrieved May 19, 2022, from

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembunuhan>

- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Laia, Dirman Jaya, Rejekinta Ginting, D. L. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembuat dan Pengguna Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor:453/Pid/2018/PT-Mdn). *Rectum*, 4(1),278–292.
- Lisi, I. Z. (2018). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia ( Review on Criminal Law Pursuant to Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik of Indonesia ). *Risalah Hukum*, 1(1), 20.
- Niken Cindy Esya Wardani, Budi Parmono, M. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki). *Dinamika*, 28(3), 3550–3568.
- Nugroho, Y., & Pujiyono. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 49–60.
- Nur, R., Ardi, M., & Wulan, S. E. R. (2020). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum TerhadapPenganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 2, 474.
- Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Romelsen, D. N. (2021). Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia. *Pakuan Law Review. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 07, 2013–2015.
- Putra, A. K., Trisnawati, E., & Kusniati, R. (2022). Penggunaan Hewan dalam Konflik Bersenjata : Kajian Hukum Humaniter Internasional. *Undang*, 5(1), 207–230. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.207-230>
- Ramadhan, R. (2019). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Istri dan Anak Kandung (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Meulaboeh). *Bidang Hukum Pidana*, 3(3), 568.
- Sari, I. (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(32), 71–72.
- Slamet Tri Wahyudi. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1, 215–216.

- Suhendi, A. (2021). Kisah Sonia Mencari Peliharaannya Bernama Tayo Hingga Bongkar Praktik Jagal Kucing di Medan. *Tribun News*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/28/kisah-sonia-mencari-peliharaannya-bernama-tayo-hingga-bongkar-praktik-jagal-kucing-di-medan>
- Sutrisna, T. (2021). Viral, Pria di Serpong Hendak Bunuh Kucing, Aksinya Tepergok Petugas Keamanan. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/21/15050781/viral-pria-di-serpong-hendak-bunuh-kucing-aksinya-tepergok-petugas?page=all>
- Sylvya Noerteta, R. (2021). *Independensi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2020 JO. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)*. Surabaya: CV. Global Aksara Pres.
- Veronica, A., & Nawawi, K. (2020). *PAMPAS : Journal Of Criminal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster*. 1, 47.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (M. R. Azmi, Ed.). Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Widiyani, H., Efridadewi, A., Pakpahan, K., & Khairunnisa. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi ). *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 283–296. Retrieved from <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v6n2.7/pdf>
- Wirawan, K. A. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan dan Pembunuhan Satwa yang Dilindungi (Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ). *VYAVAHARA DUTA*, XV(1). <https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1437>
- Yuhendrilus, Y. (2021). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor : 06/pid. B/2019/PN. Tlk). *Juhanperak*, 2(3), 963.
- Yunita Wahyu Medyawati. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar Yang Teraniaya dan Diperjualbelikan (Studi Kasus : Perdagangan Daging Kucing dan Anjing di Pasar Tomohon Sulawesi Utara). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1183–1207.